

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN
Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

- I. SIDANG PARA MENLU ASEAN
- II. KERJASAMA EKONOMI ASEAN
 - A. Perkembangan Ekonomi ASEAN
 - B. Gagasan Pembentukan Dewan Menteri Ekonomi ASEAN
 - C. Peranan ASEAN dalam GATT
 - D. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi
 - 1. Masalah Potensi Energi ASEAN
 - 2. Pengembangan Energi Non-Minyak
 - E. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
 - 1. Forum Pariwisata ASEAN ke-9
 - 2. Pertemuan Sub-Komite Pariwisata ASEAN
 - 3. Kunjungan Wisatawan ke ASEAN
 - 4. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
- III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN
 - A. Kerjasama Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - 1. Masalah Tenaga Kerja Trampil
 - 2. Informasi Ketenagakerjaan
 - B. Kerjasama Keamanan
 - 1. Masalah Fasilitas Militer
 - 2. Masalah ZOPFAN
- 3. Kerjasama Industri Pertahanan
- IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAH (NGO)
 - A. Kerjasama Antar Parlemen ASEAN (AIPO) Pertemuan Ketua Delegasi AIPO
 - B. Kerjasama Pemuda ASEAN Dialog Pemuda Indonesia-Malaysia
- V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG
 - A. Hubungan ASEAN-Jepang
 - 1. Kerjasama Kebudayaan
 - 2. Peranan Sektor Swasta Jepang
 - B. Hubungan Ekonomi ASEAN-AS
 - C. Hubungan ASEAN-MEE
 - 1. Lokakarya ASEAN-MEE
 - 2. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-MEE
- VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA
 - A. Pertemuan Informal tentang Kamboja (PIK)
 - 1. Persiapan-persiapan
 - 2. Sidang-sidang PIK

I. SIDANG PARA MENLU ASEAN

Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN berlangsung di Kuching tanggal 15 Februari 1990 untuk membahas prakarsa Australia mengenai penyelesaian konflik Kamboja, dan persiapan Pertemuan ASEAN-MEE yang akan berlangsung tanggal 16 Februari 1990.

Seusai pertemuan, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan kepada pers bahwa: (1) semua negara anggota ASEAN mendukung prakarsa Australia; (2) perundingan Kamboja macet karena empat faksi yang bertikai belum menyetujui siapa yang akan memerintah sampai pemilu terlaksana; (3) tiga faksi yang tergabung dalam pemerintahan Koalisi CGDK masih bertempur melawan faksi Hun Sen dukungan Vietnam; (4) masalah Khmer Merah dan isu-isu lainnya akan dirundingkan dalam Pertemuan Informal Kamboja (PIK) di Jakarta tanggal 26-28 Februari 1990 (*Kompas*, 16-2-1990) (Lihat usaha ASEAN membantu menyelesaikan konflik Kamboja).

Para Menlu ASEAN sepakat: (1) mendesak negara-negara Asia-Pasifik untuk tidak tergesa-gesa membentuk suatu kelompok ekonomi regional; (2) menyerukan agar pembicaraan mengenai usul Australia untuk membentuk Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik dilanjutkan; (3) agar dalam pertemuan tingkat menteri di Singapura pada bulan Juni 1990 tidak menghendaki pelembagaan APEC (*Kompas*, 17-2-1990).

II. KERJASAMA EKONOMI

A. PERKEMBANGAN EKONOMI ASEAN

Antara tanggal 1 Januari 1990 memberitakan laporan Nomura Research Institute Inc., suatu lembaga independen di Jepang, yang mengatakan bahwa: (1) Indonesia dan Malaysia menjadi semakin menarik sebagai basis produksi perusahaan-perusahaan asing, karena ekonomi Muangthai telah mencapai titik puncak sedangkan Filipina sedang dalam situasi yang kurang nyaman akibat kudeta; (2) pola pertumbuhan tradisional di Asia telah hancur karena kesenjangan dalam kompetisi ekspor semakin meluas; (3) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990 diperkirakan akan naik menjadi 6,5% dari 6,2% pada tahun 1989. Hal ini disebabkan oleh permintaan dalam negeri yang semakin kuat; (4) ekspor non-migas Indonesia akan naik karena rangsangan nilai tukar mata uang yang kompetitif dan membanjirnya investasi yang berorientasi ekspor dalam dua tahun terakhir ini; (5) pertumbuhan ekonomi Malaysia

diperkirakan akan naik dari 8,2% tahun 1989 menjadi 8,5% tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan dalam negeri dan pengalihan investasi dari Muangthai; (6) perekonomian Filipina akan turun dari 5,7% pada tahun 1989 menjadi 4,8% tahun 1990, karena kepercayaan internasional semakin menurun, akibat kudeta dan memburamnya masa depan ekonomi negara itu; (7) Muangthai yang telah kelewat tinggi pertumbuhan ekonominya selama dua tahun terakhir ini akan mengalami penurunan dari 10,3% pada tahun 1989 menjadi 8% pada tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh selain menurunnya investasi asing juga oleh banyaknya kebijakan pembatasan; (8) ekonomi Singapura akan turun dari 8,9% pada tahun 1989 menjadi 7,2% tahun 1990. Hal ini juga mencerminkan penurunan perdagangan dunia dan pasar kerja yang ketat.

Sementara itu, dalam pernyataannya yang disiarkan oleh Kantor Penerangan PBB di Jakarta tanggal 25 Januari 1990, Sekretaris Eksekutif ESCAP, A.M.S. Kirbria mengatakan bahwa: (1) kecuali Brunei Darussalam semua anggota ASEAN berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup mantap, terutama Muangthai, walaupun di antara negara anggotanya terjadi penurunan; (2) Muangthai bukan hanya menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya, tetapi juga merupakan salah satu negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya di dunia; (3) pertumbuhan ekonomi Muangthai dalam tahun 1989 mencapai 10%, tetapi hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1988 yang mencapai 11%, sedangkan pada periode yang sama Singapura juga turun dari 11% menjadi 9,4%; (4) pada periode yang sama Indonesia dan Malaysia berhasil mempertahankan penampilan mereka dengan pertumbuhan masing-masing 5,8% dan 8%; (5) lemahnya pertumbuhan ekspor Filipina menyebabkan pertumbuhan ekonominya turun dari 6,8% pada tahun 1988 menjadi 6% pada tahun 1989; (6) pertumbuhan ekonomi Indonesia selain diperoleh dari keuntungan kenaikan harga minyak bumi juga dari keberhasilan usaha meningkatkan ekspor non-migas pada tahun 1989; (7) diperkirakan pada tahun 1990 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun menjadi 5% dan pada tahun 1991 akan turun lagi menjadi 4,7%; (8) pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi Malaysia akan turun menjadi 6,5% dan turun lagi menjadi 4,9%; (9) pada tahun 1990 Singapura akan mengalami penurunan menjadi 8,9% dan 7,2% tahun 1991; (10) pada tahun 1990-an perekonomian Filipina diperkirakan akan pulih tetapi jika pada tahun 1989 pertumbuhannya hanya mencapai 6,4%, maka pada tahun 1990 hanya

akan meningkat menjadi 6,5%; (11) Filipina merupakan negara anggota ASEAN yang paling buruk pertumbuhan eksportnya. Jika pada tahun 1988 pertumbuhannya mencapai 23,7%, maka pada tahun 1989 turun menjadi 13,4%; (12) penurunan ekspor yang terjadi di Indonesia tidak setajam yang terjadi di Filipina. Jika pada tahun 1988 mencapai 12,6% maka pada tahun 1989 menjadi 10%; (13) pada tahun 1990 pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan akan turun menjadi 3,2% dan pada tahun 1991 akan naik lagi menjadi 5,5%; (14) Malaysia yang pada tahun 1989 berhasil meningkatkan pertumbuhan eksportnya, pada tahun 1990 akan menghadapi penurunan menjadi 9,4%; (15) pertumbuhan ekspor Singapura tahun 1989 mencapai 24,1%, pada tahun 1990 diperkirakan akan turun menjadi 7,9%, meskipun pada tahun 1988 pertumbuhannya mencapai 39,3%; (16) di antara negara-negara berkembang hanya Muangthai yang paling menonjol pertumbuhan eksportnya, yang pada periode 1987-1989 rata-rata mencapai 30%, dan diperkirakan akan terus berkembang di atas 20% pada tahun 1990-an; (17) pertumbuhan ekspor Muangthai terutama didorong oleh peningkatan penanaman modal asing yang diarahkan pada proyek-proyek yang berorientasi ekspor; (18) ASEAN harus menghadapi tekanan-tekanan proteksionistis dan friksi-friksi yang terjadi dalam perdagangan dunia; (19) langkah anti dumping yang diambil oleh AS dan MEE terhadap ekspor mereka telah membuat kelabu prospek pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan; (20) dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah berhasil mengundang penanam modal langsung; (21) pada tahun 1988 pertumbuhan penanaman modal asing langsung di Indonesia dan Muangthai meningkat dua kali lipat, sedangkan di Malaysia dan Filipina hanya meningkat satu setengah kali lipat (*Antara*, 26-1-1990).

B. GAGASAN PEMBENTUKAN DEWAN MENTERI EKONOMI ASEAN

Dalam seminar nasional yang bertema "Prospek Regional Pasifik Barat Daya" yang berlangsung di Ujungpandang tanggal 15 Februari 1990, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa: (1) saat ini ASEAN ketinggalan untuk mengantisipasi strategi Jepang yang akibatnya akan menimbulkan globalisme dan regionalisme ekonomi; (2) bila ASEAN tidak segera mengorganisasikan dirinya, termasuk perkembangan dan keterkaitan organisasi ekonomi serta perencanaan antara anggotanya, maka ASEAN tidak akan dapat mengambil inisiatif untuk memajukan ekonominya; (3)

dewasa ini negara-negara anggota ASEAN telah banyak kehilangan inisiatif, sementara Jepang mempunyai strategi mendasar dan berjangka jauh yang disertai dengan pelaksanaan yang sangat canggih; (4) periode 1973-1983 merupakan periode kepemimpinan ekonomi di Pasifik beralih dari AS ke Jepang; (5) strategi Jepang yang mendorong pengembangan industri di Asia Tenggara dengan memperkuat sektor swasta, sangat menarik negara-negara yang sektor swastanya lemah seperti di Indonesia; (6) pada umumnya di negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara berkembang terdapat ketentuan yang melindungi pengusaha dalam negeri, oleh karena itu secara maksimal yang dapat dilakukan Jepang adalah usaha patungan; (7) usaha patungan memerlukan modal yang besar, oleh sebab itu Jepang berusaha mencari partner yang baik karena ia tidak mau kehilangan modalnya; (8) dalam 2-3 tahun terakhir ini negara-negara anggota ASEAN sibuk melayani investasi Jepang yang melonjak dengan cepat; (9) koordinasi perencanaan ekonomi antar anggota ASEAN sampai saat ini belum tampak; (10) integrasi ekonomi ASEAN terjadi bukan berkat kerjasama ekonomi antar anggota, tetapi akibat dari kebijakan dan kegiatan investasi Jepang; (11) sampai dengan KTT Manila 1987 kerjasama ekonomi ASEAN masih dapat dikatakan untuk menurunkan atau mengurangi berbagai kendala perdagangan antar sesama anggotanya; (12) sampai tahun 1987 Indonesia masih selalu dianggap kurang kooperatif untuk membuka pasarnya bagi produk-produk sesama anggota ASEAN; (13) untuk menghadapi tantangan saat ini, ASEAN harus meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan meningkatkan kemampuan dan fungsi Sekretariat ASEAN serta budget; (14) salah satu rekomendasi panitia ahli yang disusun beberapa tahun lalu untuk membentuk Dewan Menteri yang dapat memadukan kebijakan ekonomi dan politik ASEAN perlu diwujudkan (*Kompas*, 17-2-1990).

C. PERANAN ASEAN DALAM GATT

Lokakarya Putaran Uruguay bagi Negara-negara ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 12-16 Februari 1990 yang diprakarsai oleh Pemerintah Belanda dan Sekretariat GATT merupakan tindak lanjut seminar GATT bulan September 1989 di Jakarta.

Menteri Muda Perdagangan RI, Dr. Soedradjat Djiwandono, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) masalah utama perundingan Putaran

Uruguay adalah pengakuan lebih penuh dan keterpaduan masalah-masalah yang berkembang di negara-negara berkembang dalam kerangka sistem perdagangan internasional; (2) di samping komoditi tradisional, negara-negara maju dan negara-negara berkembang juga berbeda pandangan mengenai bidang-bidang baru yang mencakup masalah jasa, investasi dan hak cipta; (3) keinginan negara-negara berkembang agar tekstil dan pakaian jadi diintegrasikan ke dalam GATT ditentang oleh negara maju yang menghendaki jenis komoditi ini dimasukkan dalam MFA semakin mempersulit tercapainya kesepakatan; (4) untuk mengatasi kesulitan, semua negara anggota Putaran Uruguay harus mendukung kesepakatan dasar Pertemuan Tingkat Menteri GATT di Punta Del Este; (5) negara-negara ASEAN dapat berperanan untuk menjembatani perbedaan pendapat antara negara maju dan negara berkembang; (6) keikutsertaan negara berkembang dalam Putaran Uruguay sebenarnya untuk mengharapkan agar terjadi perdagangan yang lebih bebas dan akses pasar yang lebih baik untuk barang dagangan mereka; (7) negara-negara ASEAN agar meneruskan dan memperkuat kerjasama untuk saling mendukung masalah yang diperjuangkan di Putaran Uruguay; (8) kerjasama ASEAN dapat dijalankan dengan mulus karena negara-negara anggotanya mendorong *liberasi* perdagangan internasional (9) salah satu usul dari kelompok Pejabat Senior Perdagangan ASEAN atau *ASEAN Senior Trade Officials* (ASTO) adalah integrasi perdagangan tekstil ke dalam GATT dan *liberasi* perdagangan produk-produk tropis.

Sementara itu, GJHC Kramer yang mewakili Pemerintah Belanda mengatakan bahwa: (1) Belanda akan menjembatani perdebatan pendapat yang muncul dalam negosiasi Putaran Uruguay yang sidang penutupannya akan berlangsung di Brussels akhir tahun 1990; (2) untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam Putaran Uruguay, dalam waktu sepuluh bulan ini kedua pihak harus melakukan kerja keras; (3) jangkauan GATT harus diperluas, terutama untuk bidang baru, seperti jasa, investasi dan hak cipta, karena banyak negara mengalami stagnasi ekonomi, peningkatan proteksionisme dan pendekatan bilateral dalam penyelesaian konflik perdagangan; (4) beberapa hal yang perlu diubah dari Putaran Uruguay adalah: (a) anti dumping; (b) peraturan atau pengecualian GATT untuk negara berkembang; (c) tekanan-tekanan yang mengancam atau menggoyahkan tatanan GATT sendiri (*Suara Karya*, 13-2-1990).

D. KERJASAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

1. Masalah Potensi Energi ASEAN

Seminar Energi 90 berlangsung di Manila tanggal 24-27 Januari 1990 untuk membahas peranan energi minyak bumi menjelang abad ke-21 di negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia-Pasifik.

Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia, Ir. Ginandjar Kartasasmita, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) pada akhir dekade 1990 ASEAN dapat menjadi pengimpor energi penuh, terutama bila suplai energi yang berasal dari kawasan ASEAN tidak banyak bertambah; (2) produksi energi ASEAN dalam tahun 1988 mencapai 3,6 juta barrel setara minyak per hari (BOE atau *barrel of equivalent*), sedangkan permintaan energinya hanya 2,1 BOE/hari sehingga ASEAN memiliki surplus energi 1,5 BOE/hari; (3) selama lima tahun terakhir permintaan energi ASEAN rata-rata meningkat 8%/tahun dan jika keadaan ini tetap konstan sedangkan suplainya tidak bertambah, maka pada dekade 1990-an permintaan energi dapat mencapai 5,3 juta BOE/hari dan akibatnya ASEAN akan mengalami defisit energi sekitar 1,7 juta BOE/hari; (4) permintaan energi di Asia-Pasifik, terutama ASEAN akan tetap tinggi; (5) surplus energi ASEAN sulit dipertahankan, karena hanya Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang mengekspor gas, minyak bumi dan batu bara, sedangkan tiga negara anggota ASEAN yang lain merupakan negara pengimpor minyak penuh; (6) jika harga minyak naik sampai US\$30/barrel, dapat diperkirakan bahwa pada akhir dekade 1990-an ASEAN perlu menyisihkan dana sekitar US\$18 milyar/tahun untuk membeli energi minyak; (7) ASEAN perlu melakukan studi secara multinasional untuk mencari berbagai kemungkinan agar lebih mandiri di bidang energi yang didasarkan pada kepentingan nasional setiap negara tanpa melalakan kerjasama antara negara anggota ASEAN; (8) pemakaian sumber-sumber energi non-minyak di kawasan ASEAN sangat penting, karena ketergantungan yang terlalu besar pada energi minyak bumi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang; (9) kemandirian ASEAN di bidang energi dapat melepaskan ketergantungannya pada sumber-sumber energi di luar ASEAN; (10) pencarian sumber minyak baru di ASEAN perlu terus dilanjutkan; (11) diversifikasi dan pengembangan sumber energi diutamakan pada energi yang tidak dapat diekspor seperti tenaga air, panas bumi, matahari, biomas dan gambut; (12) minimal terda-

pat 3,5 milyar ton batu bara dan 150 trilyun kaki kubik gas alam yang telah ditemukan dan dapat diproduksi di lima negara anggota ASEAN, sedangkan cadangan minyak yang sudah ditemukan sekitar 13,4 milyar barrel; (13) diperkirakan masih terdapat cadangan batu bara sekitar 28 milyar ton dan 350 trilyun kaki kubik gas alam; (14) cadangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi domestik masing-masing anggota dan dapat diperjualbelikan antar sesama anggota ASEAN (*Kompas*, 25-1-1990).

2. Pengembangan Energi Non-Minyak

Simposium Kerjasama Energi Pasifik ke-4 berlangsung di Tokyo tanggal 30 Januari 1990, dihadiri oleh utusan 15 negara, termasuk ASEAN, dan Prof. Dr. Subroto selaku Sekjen OPEC dan Dirjen Tenaga Listrik dan Energi Baru Indonesia, Prof. Dr. A. Arismunandar.

Ketua Kelompok Eksportir Batu Bara ASEAN, Achmad Priyono, mengatakan dalam pertemuan itu bahwa: (1) Indonesia, Muangthai, Filipina dan Malaysia sedang mengembangkan penggunaan sumber non-minyak, seperti batu bara, gas alam, tenaga air dan tenaga panas bumi sebagai sumber energinya; (2) proses diversifikasi sumber energi selain minyak yang sudah dimulai sejak terjadi krisis minyak tahun 1973-1974 sampai sekarang belum ketinggalan momentum; (3) untuk memenuhi permintaan energi tenaga listrik dan semen seiring dengan lajunya pembangunan ASEAN, sumber energi non-minyak merupakan pilihan utama karena harganya bersaing; (4) meskipun Malaysia merupakan negara pengekspor minyak dan mempunyai cadangan gas alam yang berlimpah, namun tetap menggunakan batu bara untuk pembangkit tenaga listriknya di Serawak; (5) sumber minyak yang terbatas di Muangthai dan penemuan baru cadangan gas alam di Teluk Thailand, kemungkinan akan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan energi di dalam negeri; (6) ketergantungan Muangthai pada minyak impor untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri tahun 1973 mencapai 94,4% dan pada tahun 1985 turun menjadi 53,8%; (7) cadangan batu bara Filipina yang cukup besar kemungkinan akan dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik bertenaga batu bara yang akan dibangun di Batangas Luzon Selatan dengan kapasitas 300-600 Mw dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2000; (8) Indonesia sedang mengembangkan pusat pembangkit listrik bertenaga batu bara di Surabaya yang berkapasitas 4x400 Mw dan Proyek Paiton I

dengan kapasitas 2x400 Mw; (9) andil batu bara sebagai sumber energi di Indonesia pada akhir Pelita III (1983/1984) baru mencapai 0,51% dan pada akhir Pelita IV (1988/1989) meningkat menjadi 6,1%, dan diperkirakan pada masa mendatang akan terus meningkat lagi; (10) tiga penyebab kecenderungan ASEAN menggunakan batu bara sebagai sumber energi adalah: (a) usaha untuk mengurangi ketergantungan impor minyak; (b) harga batu bara relatif lebih murah dibandingkan sumber energi lainnya; (c) makin pesatnya pertumbuhan ekonomi ASEAN yang mendorong peningkatan permintaan tenaga listrik dan semen (*Antara*, 31-1-1990).

E. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Forum Pariwisata ASEAN ke-9

Forum Pariwisata ASEAN ke-9 atau Forum Pariwisata ASEAN 1990 atau *ASEAN Tourism Forum 1990* (ATF) berlangsung di Pattaya tanggal 13-18 Januari 1990, dihadiri sekitar 1.100 peserta termasuk 259 perusahaan pariwisata di ASEAN dan 250 perusahaan pariwisata dari luar kawasan ASEAN dengan mengambil tema "Pariwisata ASEAN: Menuju Destinasi Kualitas" (*Business News*, 17-1-1990).

Presiden Badan Otoritas Pariwisata Muangthai, Korn Dabbaransi, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) semua negara anggota ASEAN agar mempererat kerjasama untuk menggalakkan kepariwisataan regional dan meningkatkan jasa pelayanan; (2) diperkirakan jumlah wisatawan ke ASEAN mengalami peningkatan dramatis, dari 14,5 juta wisatawan pada tahun 1988 menjadi 22,5 juta orang dalam rangka Visit ASEAN Year 1992 (*Antara*, 15-1-1990); (3) kerjasama pariwisata antara pemerintah dan swasta di ASEAN yang berusaha menjaga kelestarian dan mengembangkan sumber-sumber pariwisata tidak dapat diabaikan; (4) sesama unsur pariwisata di ASEAN, baik pemerintah maupun swasta, perlu menjaga keseimbangan produk pariwisata dan promosinya; (5) perkembangan yang terlalu cepat akan menciptakan dampak terhadap nilai-nilai kebudayaan dan lingkungan hidup; (6) penentuan harga produk dan jasa pariwisata sebaiknya tidak terlalu diserahkan kepada mekanisme pasar, agar para wisatawan tidak dimanipulasi oleh para operator wisata; (7) dalam pertemuan ini yang paling penting adalah saling tukar-menukar gagasan dan pendapat (*Suara Pembaruan*, 18-1-1990).

Sementara itu Dirjen Pariwisata Indonesia mengatakan bahwa: (1) ASEAN memerlukan sebuah sub-organisasi bagi ASEANTA agar memungkinkan negara-negara Asia Tenggara non-ASEAN dapat ikut serta dan badan baru ini akan berfungsi di bawah ASEANTA yang bergerak untuk mengembangkan potensi kepariwisataan di Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar; (2) meskipun Kamboja harus mencapai perdamaian terlebih dahulu, tetapi negara itu telah kedatangan 3.000 wisatawan asing; (3) Vietnam telah menegaskan niatnya untuk mempromosikan pariwisata sebagai suatu cara untuk membangun ekonominya; (4) negara-negara sosialis di Indocina saat ini telah mulai melibatkan diri dalam bisnis pariwisata, karena itu pembentukan sebuah badan terpisah yang dapat mereka masuki dapat mempercepat laju pengembangan kepariwisataan mereka (*Antara*, 18-1-1990).

2. Pertemuan Sub-Komite Pariwisata ASEAN

Pertemuan Sub-Komite Pariwisata ASEAN (SCOT) berlangsung di Pattaya tanggal 11-14 Januari 1990 untuk: (1) menciptakan sadar wisata sehubungan dengan penyelenggaraan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1991 untuk menarik wisatawan ke ASEAN; (2) memperkuat kerjasama antara organisasi-organisasi pariwisata di kawasan ASEAN (*Antara*, 16-1-1990).

Pertemuan sepakat untuk: (1) meminta negara-negara anggota ASEAN agar memperbesar peranan sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan, dan dalam waktu dekat pemerintah hanya akan sebagai pengawas; (2) memulai kegiatan promosi Tahun Kunjungan Wisata di Perancis, Jerman Barat dan Inggris; (3) menyelenggarakan pertemuan SCOT selanjutnya di Bandung. Hasil lainnya: diperkirakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke ASEAN pada tahun 1992 mencapai 22,5 juta orang dan tahun 1994 menjadi 24,8 juta orang. Di samping itu, pada Tahun Kunjungan Wisata ASEAN setiap negara anggota ASEAN akan menyelenggarakan sekurang-kurangnya 30 acara nasional dan akan segera dibentuk paket khusus yang melibatkan sekurang-kurangnya tiga negara anggota ASEAN (*Antara*, 16-1-1990).

3. Kunjungan Wisatawan ke ASEAN

Menteri Pariwisata Filipina, Garrudo, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 12 Februari 1990 bahwa:

(1) wisatawan mancanegara yang berkunjung ke ASEAN tahun 1992 diharapkan mencapai 22,5 juta orang dan diperkirakan menghasilkan devisa sekitar US\$21 milyar; (2) pada periode 1988-1989 ASEAN mengalami pertumbuhan wisatawan yang belum pernah terjadi dalam sejarah; (3) ASEAN merupakan tujuan wisatawan Asia Timur dan kawasan Pasifik; (4) sasaran kunjungan wisata Filipina tahun 1992 adalah dua juta orang dan pada akhir tahun 1990-an sekitar lima sampai tujuh juta orang (*Antara*, 12-2-1990).

4. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan

Dalam seminar sehari dengan judul "Prospek Bisnis Baru ASEAN," yang diselenggarakan oleh World Centre Jakarta, tanggal 28 Februari 1990, Dr. Djisman S. Simandjuntak' mengatakan bahwa: (1) keadaan sekarang ini sangat sulit menarik minat para pengusaha ASEAN untuk melakukan kerjasama; (2) pasar ASEAN sangat kecil dibandingkan dengan pasar Eropa Barat, Jepang dan Amerika Serikat; (3) para pengusaha ASEAN masih diragukan dapat melakukan kerjasama; (4) hubungan perdagangan luar negeri ASEAN berorientasi ke negara-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat dan Eropa Barat; (5) peningkatan kerjasama bisnis negara-negara ASEAN masih kecil dan secara umum perdagangan barang dan jasa negara-negara ASEAN terpusat di Singapura; (6) pemanfaatan pasar ASEAN akan dapat mengurangi kerawanan akibat guncangan ekonomi yang mungkin terjadi di negara-negara Pasifik (*Suara Pembaruan*, 1-3-1990); (7) lemahnya hubungan bisnis antara negara-negara ASEAN merupakan cermin persaingan tajam di pasar internasional; (8) investasi Jepang yang semula untuk melayani pasar negara-negara ASEAN dapat menjadi kekuatan integratif yang merupakan rancangan global ekonomi Jepang (*Merdeka*, 1-3-1990).

Dalam makalahnya yang berjudul "Prospek Makro Ekonomi Negara-negara ASEAN," Dr. Mari Pangestu mengatakan bahwa: (1) bila orientasi produksi diarahkan ke luar negara-negara ASEAN, maka peluang bisnis bagi usaha patungan pengusaha ASEAN harus dapat berhasil; (2) gagalnya kerjasama patungan antara para pengusaha ASEAN disebabkan oleh tiadanya dukungan kebijaksanaan pemerintah negara-negara ASEAN; (3) kebijaksanaan perekonomian pemerintah negara-negara ASEAN itu berorientasi pada perlindungan industri dalam negerinya (*Angkatan Bersenjata*, 1-3-1990); (4) di antara negara-negara ASEAN yang

satu dan lainnya lebih bersifat saling bersaing daripada menjamin suatu kerjasama ekonomi; (5) proteksi atas suatu produksi konsumsi masing-masing negara dilaksanakan secara ketat jika produk itu dihasilkan oleh negara anggota lain, kecuali jika produk itu dapat diekspor; (6) bagi Indonesia, Muangthai merupakan saingan terkuat dalam perdagangan internasional (*Merdeka*, 1-3-1990).

III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

A. KERJASAMA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Masalah Tenaga Kerja Trampil

Ketua Asosiasi Insinyur Konsultan Malaysia mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 22 Januari 1990 bahwa: (1) Pertemuan Tahunan Federasi Insinyur Konsultan ASEAN (FACE) akan diselenggarakan di Penang tanggal 10 Februari 1990 untuk membahas masalah tenaga kerja trampil; (2) saat ini Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja yang trampil dan terlatih untuk menangani proyek-proyek besar yang sedang dan akan dilaksanakan; (3) untuk mengatasi kekurangan tenaga trampil dan terlatih, kemungkinan Malaysia akan mendatangkan tenaga kerja jenis itu dari Indonesia dan Filipina; (4) selama ini pemerintah Malaysia tidak mengakui kualifikasi pekerja yang dilatih oleh lembaga teknik swasta; (5) kualifikasi pekerja yang tidak diakui oleh pemerintah akan mudah dieksploitasi dan dibayar dengan upah yang rendah (*Antara*, 22-1-1990).

2. Informasi Ketenagakerjaan

Ketika meresmikan penerbitan Bulletin Ketenagakerjaan Indoline News Letter di Jakarta tanggal 12 Februari 1990, Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara mengatakan bahwa: (1) kegiatan studi perbandingan, riset dan tukar-menukar informasi dapat berjalan lancar jika didukung oleh jaringan informasi yang dapat diandalkan; (2) perbedaan kebijaksanaan, praktek-praktek dan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN di bidang industrial akan merupakan sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi kegiatan riset dan studi perbandingan; (3) meskipun proyek program ASEAN tentang studi ketenagakerjaan dan hubungan industrial telah berakhir tahun 1989, tetapi kegiatan tukar-menukar informasi ketenagakerjaan

ASEAN tidak boleh berakhir; (4) jaringan informasi nasional masing-masing negara anggota ASEAN perlu lebih diaktifkan kembali; (5) penerbitan Indoline News Letter akan mempunyai peranan untuk menunjang peningkatan arus informasi ketenagakerjaan di lingkungan ASEAN; (6) liputan yang hanya mencakup hubungan industrial dan hukum perburuhan dalam bulletin ini masih dapat diperluas hingga mencakup semua aspek ketenagakerjaan; (7) ruang lingkup penyebaran bulletin perlu diperluas, bukan hanya di lingkungan ASEAN (*Suara Karya*, 13-2-1990).

B. KERJASAMA KEAMANAN

1. Masalah Fasilitas Militer

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Soenarso Djajusman, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 8 Februari 1990 bahwa: (1) Malaysia mencurigai membaiknya hubungan Indonesia-Singapura, khususnya mengenai kesediaan Indonesia untuk memberikan fasilitas militer di Pekanbaru untuk Angkatan Bersenjata Singapura; (2) Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan Singapura dan menganggapnya bukan sebagai ancaman. Penyediaan fasilitas militer di Pekanbaru karena alasan-alasan praktis saja, seperti perdagangan (*Kompas*, 16-2-1990).

Sementara itu, Deputy Perdana Menteri Malaysia, Ghafar Baba, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 15 Februari 1990 bahwa: (1) Malaysia tidak khawatir bila Indonesia semakin dekat dengan Singapura karena negaranya juga memiliki hubungan baik dengan Singapura dan ketiganya adalah anggota ASEAN; (2) penyediaan fasilitas militer Indonesia untuk Singapura bukan menjadi ancaman bagi negaranya, meskipun hubungan baik Indonesia-Malaysia berulang kali dihadang berbagai masalah; (3) sebagai negara mayoritas Islam, Malaysia selalu mewaspadaai militer Singapura yang mayoritas beretnis Cina; (4) Malaysia menghargai hak Indonesia menyediakan fasilitas untuk Angkatan Bersenjata Singapura; (5) setiap masalah dapat diselesaikan melalui perundingan karena negaranya bukan bangsa yang suka berperang (*Kompas*, 16-2-1990).

2. Masalah ZOPFAN

Menteri Pertahanan Malaysia, Tengku Ahmad Rf

thaudeen, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 19 Maret 1990 bahwa: (1) negara-negara anggota ASEAN, khususnya Malaysia, bertanggung jawab untuk mewujudkan ZOPFAN; (2) negaranya ingin melihat agar komitmen ASEAN dalam Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 dilanjutkan untuk menjamin dan melestarikan perdamaian ASEAN; (3) tawaran Singapura kepada AS bukan untuk mendirikan sebuah pangkalan militer, tetapi hanya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan dan perawatan (*Angkatan Bersenjata*, 21-3-1990).

3. Kerjasama Industri Pertahanan

Pertemuan informal para Pejabat Industri Pertahanan ASEAN berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 21 Maret 1990, dihadiri oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Tengku Ahmad Rithaudeen, Pangab Singapura, Winston Choo dan Wakil Menteri Pertahanan Singapura, B.G. Lee, Menteri Pertahanan Filipina, Jenderal Fidel Ramos serta Menristek Prof. Dr. B.J. Habibie untuk membahas kerjasama industri pertahanan ASEAN.

Hasil pertemuan antara lain: (1) mereka sepakat untuk membangun ikatan yang lebih erat guna memperkokoh daya saing produk mereka di pasar dunia; (2) mereka sependapat bahwa pemasaran dan produksi bersama akan mengurangi biaya dan menghemat waktu, selain itu juga memungkinkan produk mereka mencapai hasil dalam pasar dunia yang semakin kuat persaingannya; (3) kemampuan dan kelemahan masing-masing negara anggota dapat untuk saling membantu mengatasi kesulitan; (4) sudah tiba saatnya bagi ASEAN untuk menyatukan kegiatan industri pertahanan; (5) mereka sepakat agar perusahaan-perusahaan alat pertahanan ASEAN membentuk suatu organisasi untuk memajukan tujuan bersama; (6) mereka sependapat bahwa untuk membuat produk yang lebih murah dan lebih baik diperlukan dua atau tiga perusahaan ASEAN untuk bekerjasama; (7) mereka sependapat agar perusahaan-perusahaan pertahanan ASEAN yang ikut serta dalam pameran internasional merupakan suatu kelompok dan bukan sendiri-sendiri; (8) mereka sepakat untuk membentuk suatu pusat informasi di setiap negara anggota ASEAN. Namun demikian mereka juga akan meragukan atas gagasan produksi bersama karena: (a) kepentingan nasional masing-masing negara mungkin akan menjadi faktor penghambat; (b) pada umumnya perusahaan pertahanan ASEAN adalah milik negara yang memungkinkan pemerintah enggan untuk berbagi in-

formasi yang menyangkut kepentingan nasional; (c) bagi yang memiliki teknologi tinggi mungkin tidak memandang perlu kerjasama seperti itu (*Antara*, 22-3-1990).

Sementara itu, Menristek Prof. Dr. B.J. Habibie mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 22 Maret 1990 bahwa: (1) pada bulan Juni 1996 Indonesia akan mengadakan pameran udara kedua di Bandara Halim Perdanakusumah; (2) untuk mengatasi tingginya persaingan akibat banyak perusahaan dan negara yang bersatu dalam industri pertahanan, ASEAN harus bekerjasama dalam industri jenis itu; (3) meskipun saat ini masih banyak kendala yang harus diatasi, ASEAN harus dapat bersatu dalam berbagai bidang kerjasama; (4) karena masih terdapat perbedaan-perbedaan, baik dalam prioritas dan jumlah anggaran maupun teknologi dan sistem pertahanan di setiap negara anggota ASEAN, maka diperlukan berbagai pendekatan agar kerjasama industri pertahanan itu terlaksana; (5) standarisasi senjata merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai perbedaan, karena persamaan standar memungkinkan pasaran senjata akan tinggi, sehingga pekerjaan dapat dibagi-bagikan ke masing-masing negara sesuai dengan kemampuannya; (6) pembuatan pesawat N-250 dapat dikerjakan bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya, oleh karena itu jika ada negara yang menanamkan investasi suku cadang N-250 maka Indonesia pasti membelinya; (7) sebelum menuju ke arah kerjasama multilateral, perlu terlebih dahulu dilakukan kerjasama bilateral, sehingga dua negara yang kemampuannya sama dapat melempar hasilnya ke pasar seluruh negara anggota ASEAN; (8) untuk mendukung industri pertahanan bersama diperlukan riset pasar, karena pasar diperlukan agar industri tetap berjalan; (9) kerjasama bilateral industri pertahanan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir abad ke-20 (*Kompas*, 24-3-1990).

Jenderal Purnawirawan Soemitro mengatakan kepada Antara di Kuala Lumpur tanggal 23 Maret 1990 bahwa: (1) anggota ASEAN lainnya harus bersikap akomodatif terhadap Singapura, agar negara ini tidak merasa terancam dan tidak mencari penasihat militer dari Israel. Sikap yang demikian itu akan mendorong ASEAN untuk semakin menjalankan kebijaksanaan berdasarkan fakta saling ketergantungan; (2) kebijakan Indonesia memberi ruang latihan udara bagi Singapura sangat tepat dan negara ASEAN lainnya perlu menjaga kelangsungan hidup negara itu; (3) kecenderungan dunia sekarang bergerak ke arah perda-

maian, saling ketergantungan yang semakin besar dan persaingan ekonomi yang semakin tajam juga; (4) peran Singapura dalam konteks kerjasama regional harus jelas; (5) telah tumbuh kecenderungan untuk membentuk kelompok regional seperti ASEAN, yang banyak menunjukkan hasil yang riil; (6) Singapura dapat dijadikan pusat keuangan, konsultasi dan jasa yang bermanfaat bagi anggota ASEAN lainnya; (7) Singapura harus diberi fungsi yang jelas dengan terlebih dahulu mempelajari kepentingan nasionalnya dan sebab-sebab mengapa negara itu dapat survive dan menjadi negara industri baru; (8) untuk mengatasi masalah seperti di Singapura itu, negara-negara anggota ASEAN harus berjiwa besar; (9) masalah Cina perantauan tidak dapat dikaitkan dengan kebijaksanaan menghadapi Singapura dan hal itu perlu dihapus dari ASEAN agar tidak terperangkap dalam konsep budaya lama mengenai Cina perantauan; (10) sekarang merupakan masa transisi dari era kolonialisme dan perang dingin menuju ke arah dunia yang lebih damai, sehingga ada tuntutan-tuntutan baru untuk mengatasinya secara tepat; (11) beberapa ciri era baru sekarang ini ialah: (a) dunia semakin kecil; (b) hubungan antar bangsa semakin erat; (c) kompetisi semakin tajam; (d) perdamaian, perikemanusiaan dan pembangunan semakin meningkat; (12) pola-pola dan budaya lama yang selalu mengandung kecurigaan satu sama lain secara sadar harus dilepaskan dan diganti dengan pola kerjasama; (13) Singapura perlu diajak menyusun konsep bersama untuk mempertemukan kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN; (14) pengaturan keamanan bersama yang bukan pakta militer dan bersifat *inward looking* (pandangan ke dalam) sangat penting dan diperlukan untuk menghilangkan kecurigaan satu sama lain yang merupakan hambatan utama untuk kerjasama. Di samping itu jika kerjasama militer sudah berjalan maka kerjasama di bidang lainnya akan mudah dilaksanakan (*Antara*, 23-3-1990).

Menteri Pertahanan Filipina, Fidel Ramos, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 23 Maret 1990 bahwa: (1) pertemuannya dengan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, di Kuala Lumpur tanggal 22 Maret 1990 adalah untuk membahas pengembangan industri pertahanan ASEAN; (2) pengembangan industri persenjataan secara bilateral atau regional, diharapkan akan menciptakan keseragaman persenjataan, keahlian dan teknis persenjataan di negara-negara ASEAN; (3) program latihan militer bersama akan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara anggota ASEAN; (4) kerjasama peralatan militer ASEAN akan mengurangi ketergantungan dari Barat (*Kompas*, 26-3-1990).

IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAH (NGO)

A. KERJASAMA ANTAR PARLEMEN ASEAN (AIPO)

Pertemuan Ketua Delegasi AIPO

Pertemuan Ketua-ketua Delegasi AIPO yang juga dihadiri oleh 18 orang anggota Parlemen negara ASEAN, kecuali Brunei Darussalam, berlangsung di Jakarta tanggal 16-17 Februari 1990 untuk membahas: (1) peresmian Sekretariat Tetap AIPO di Gedung Tadharta Samiti I Senayan Jakarta; (2) pokok-pokok materi sehubungan dengan peresmian Sekretariat Tetap AIPO; (3) kesepakatan tentang struktur organisasi, formasi sekretariat, lingkup tugas dan fungsi Sekjen serta masalah anggaran dana yang diperlukan (*Antara*, 16-2-1990).

Resolusi No. 20 tahun 1989 tentang penetapan Sekretariat Tetap yang dicetuskan dalam Sidang Umum AIPO X di Manila, merupakan terobosan bersejarah karena baru dapat dilaksanakan setelah 12 tahun AIPO berdiri, tahun 1977. Terpilihnya Jakarta sebagai tempat Sekretariat Tetap merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia dan memiliki arti politis yang positif karena telah lama diperjuangkan. Diresmikannya Sekretariat Tetap AIPO diharapkan mampu mendinamisasikan hubungan antar anggota AIPO, baik melalui Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN, Komite-komite dan Setjen ASEAN di Jakarta serta AIPO dengan mitra dialog, baik di kawasan Asia-Pasifik maupun Masyarakat Eropa (*Antara*, 16-2-1990).

Presiden Soeharto mengatakan ketika menerima Ketua AIPO Tan Soo Khoon di Bina Graha tanggal 17 Februari 1990 bahwa: (1) sidang hendaknya membahas perubahan politik yang terjadi di Eropa Timur, karena perubahan itu dapat mempengaruhi perkembangan internasional, termasuk ASEAN; (2) sidang agar mendiskusikan dan menyusun strategi untuk menghadapi berbagai perkembangan di Uni Soviet dan Eropa Timur (*Antara*, 17-2-1990).

Sementara itu Tan Soo Khoon mengatakan bahwa negara-negara Barat diperkirakan akan meningkatkan perhatian kepada negara-negara di Eropa Timur. Hal ini dikhawatirkan karena dapat mengurangi perhatian kepada ASEAN (*Antara*, 17-2-1990).

Ketua DPR/MPR-RI, M. Kharis Suhud mengatakan se usai peresmian Sekretariat AIPO tanggal 17 Fe-

bruari 1990 bahwa: (1) Indonesia akan mengajukan calon Sekjen AIPO yang akan berkedudukan di Jakarta dalam Sidang Umum (SU) AIPO ke-11 di Singapura, September 1990; (2) pencalonan Sekjen dan Deputi Sekjen AIPO untuk periode 1990-1993 itu perlu mendapat rekomendasi dari masing-masing Ketua Delegasi Parlemen untuk kemudian disetujui dan dipilih oleh Sidang Umum; (3) Sekretariat Nasional AIPO juga akan dibentuk sebagai sarana penghubung antara Sekretariat Tetap AIPO dan seluruh anggota Parlemen ASEAN.

Peresmian Kantor Sekretariat Tetap AIPO itu dilakukan dengan penandatanganan oleh masing-masing Ketua Delegasi Parlemen ASEAN yaitu dari Indonesia, M. Kharis Suhud; Malaysia, Tan Sri Dato Mohamed Zahir bin Haji Ismail; Filipina, Antonio V. Cuenco; Singapura, Liem Boen Heng dan Muangthai, Prof. Dr. Prasop Ratanakorn (*Antara*, 18-2-1990).

Sekjen AIPO Muangthai, Prasopwho, mengatakan kepada kantor berita Thailand "TNA" di Bangkok tanggal 24 Februari 1990 bahwa: (1) negaranya menyetujui untuk menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPO ke-12; (2) Sekretaris Tetap AIPO akan ditunjuk pada Sidang Umum ke-11 yang akan dilaksanakan di Singapura, September 1990 (*Antara*, 25-2-1990).

B. KERJASAMA PEMUDA ASEAN

Dialog Pemuda Indonesia-Malaysia

Dialog Pemuda Indonesia-Malaysia II berlangsung di Cisarua Bogor tanggal 17-20 Januari 1990, dihadiri oleh beberapa Menteri dari kedua negara dan diikuti oleh 45 tokoh pemuda Malaysia serta 84 pemuda dari Indonesia.

Menhankam L.B. Moerdani mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) masyarakat kedua negara mempunyai alasan kuat untuk menyatakan ada kemiripan dalam berbagai bidang kehidupan, meskipun di sisi lain terdapat sejumlah perbedaan dalam sendi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; (2) pengalaman sejarah kedua bangsa menunjukkan bahwa hubungan khusus kedua negara tidak dapat dianggap sebagai suatu yang memang sewajarnya harus terjadi, periode konfrontasi dan permusuhan yang menjerumuskan kedua negara hanya merupakan satu contoh yang paling jelas; (3) perbedaan obyektif kedua negara dapat dikenali dalam berbagai bidang yang menyangkut wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan alamnya. Selain itu, secara ideolo-

gis mereka juga menunjukkan perbedaan yang berarti, meskipun hakikat persoalannya bersifat domestik tetapi pantas untuk tidak dikesalkan artinya; (4) jika kedua negara memiliki kesadaran bersama sebagai warga negara satu dunia yang lebih luas dan hakikat tantangannya yang serupa, maka hal itu akan lebih bijaksana; (5) tantangan utama dewasa ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah bagaimana memberi jawaban untuk menyongsong abad Pasifik; (6) Indonesia dan Malaysia perlu meningkatkan kerjasama, terutama di bidang ekonomi, mengingat perkembangan ekonomi di sekeliling kawasan Pasifik; (7) kedua negara harus menghadapi perkembangan di wilayah Pasifik untuk dapat secara bertanggung jawab memanfaatkan secara maksimal keuntungan yang dapat diperoleh dan menghindari sejauh mungkin kerugian yang dapat timbul; (8) Indonesia dan Malaysia harus bahu-membahu di dalam ASEAN untuk mencegah fragmentasi lebih lanjut dari perekonomian dunia dan kawasan Pasifik pada khususnya, dengan memanfaatkan integritas politik ASEAN; (9) pendekatan ketahanan regional hendaknya digunakan dalam rangka pembinaan stabilitas kawasan ASEAN dan Asia Tenggara, termasuk pemecahan masalah regional; (10) pemahaman dan penyebarluasan konsepsi ketahanan regional hendaknya dapat dijadikan agenda pertemuan ini (*Antara*, 19-1-1990).

Sementara itu, Menko Kesra Soepardjo Rustam mengatakan: (1) kerjasama antar negara, baik dalam lingkup bilateral, regional maupun global, mempunyai arti penting untuk meningkatkan hubungan antar negara beserta aspek kehidupan masyarakat; (2) hubungan kerjasama secara esensial mengisyaratkan perlunya wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang terbuka yang mampu memadukan budaya sendiri dengan elemen-elemen budaya global, karena ketertutupan hanya akan mengakibatkan keterbelakangan; (3) kontinuitas dan kebersamaan sangat penting bagi masa depan hubungan Indonesia dan Malaysia, baik dalam lingkup bilateral maupun dalam lingkup kerjasama ASEAN; (4) semangat kebersamaan sangat penting artinya bagi kedua negara karena melalui semangat itu kekurangan di suatu negara dapat ditutup oleh kelebihan yang dimiliki mitranya. Di samping itu, semangat kebersamaan tidak hanya menjamin kontinuitas hubungan kedua pihak, tetapi juga hubungan antar negara dalam lingkup ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 19-1-1990).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Y.B. Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, mengatakan: (1) Indonesia dan Malaysia

sebagai rumpun yang sama hendaknya dapat meningkatkan rasa kekeluargaan yang sudah dirasakan bersama selama ini; (2) sejarah Malaysia yang melukiskan adanya rasa kebersamaan antar kedua bangsa hendaknya dijadikan pendorong ke arah usaha-usaha yang lebih maju dan konkrit; (3) generasi muda sudah sewajarnya meneruskan perjuangan yang telah diwariskan oleh para pejuang pendahulunya; (4) di zaman modern ini, emosi tidak cukup untuk menangani suatu keadaan, tetapi kebersamaan dapat melumpuhkan segala tantangan yang dihadapi; (5) perjuangan generasi muda kedua negara diharapkan membuahkan hasil untuk kepentingan bersama.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Ir. Akbar Tanjung mengatakan bahwa: (1) dialog ini pada dasarnya mengacu pada dasar-dasar kerjasama pemuda yang telah dicapai pada dialog yang lalu; (2) sejak awal, generasi muda kedua negara sadar akan perannya sebagai unsur pembawa perubahan dalam pembangunan nasional dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa; (3) generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa perlu semakin menyadari tanggung jawabnya untuk melanjutkan hubungan baik yang telah dirintis oleh para pemimpin bangsa kedua negara (*Angkatan Bersenjata*, 19-1-1990).

Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) membaiknya hubungan Timur-Barat dan polarisasi serta ketimpangan hubungan Utara-Selatan akan menjadi masalah global yang menyolok di masa mendatang; (2) ASEAN dituntut tetap waspada untuk menghadapi tantangan akibat lingkungan eksternal yang sedang dalam transisi menuju suatu tatanan internasional baru; (3) untuk menghadapi tantangan yang timbul, ASEAN dalam Deklarasi KTT Manila 1987 telah menyatakan tekad untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama sebagai organisasi regional yang kohesif dan dinamis untuk menghadapi berbagai masalah, baik yang menyangkut kepentingan intra ASEAN maupun antara ASEAN dan pihak-pihak di luar kawasan; (4) kawasan Asia-Pasifik, khususnya negara-negara pantai di Asia Timur, telah mencatat pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi yang sangat pesat; (5) interaksi dan interdependensi antara negara-negara di kawasan ini dipastikan akan berkembang terus dan mengakibatkan perubahan pola perdagangan dan investasi, arus dana dan teknologi serta keuntungan komparatif setiap negara; (6) sejak semula negara-negara anggota ASEAN telah menyadari bahwa di samping peluang-peluang yang ada, terdapat pula kendala yang dapat menghambat

perkembangan kawasan ini, bahkan berpotensi melahirkan pertentangan baru bila tidak dihayati dan ditangani secara bijaksana; (7) kesadaran akan masa depan kawasan Pasifik yang membawa prospek cerah telah membuat ASEAN senantiasa hati-hati menilai setiap ajakan untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara Pasifik; (8) anggapan yang mengatakan seolah-olah masalah Kamboja menjadi perekat hubungan kerjasama antara negara ASEAN adalah keliru, karena jika masalah Kamboja dapat diselesaikan kerjasama ASEAN akan lebih berkembang dan menguntungkan (*Antara*, 19-1-1990).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato H. Abu Hasan Omar, mengatakan: (1) pergolakan-pergolakan di beberapa bagian dunia seperti di Eropa Timur akhir-akhir ini akan berdampak pada negara-negara ASEAN; (2) perkembangan di Eropa Timur dapat mendorong negara-negara maju untuk memusatkan kegiatan ekonomi mereka di sana, yang pada gilirannya akan mengurangi hubungannya dengan ASEAN; (3) kemampuan negara anggota ASEAN untuk mengesampingkan kepentingan negara masing-masing merupakan persoalan tersendiri; (4) jika ingin maju, ASEAN harus mempererat kerjasama lagi.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Malaysia, Tengku Ahmad Rithaudeen, mengatakan: (1) pembangunan politik dirumuskan sebagai pembangunan demokrasi yang pada gilirannya berkaitan erat dengan aspek mobilisasi dan keikutsertaan massa; (2) pembinaan institusi yang menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, jaminan undang-undang dan jaminan bagi golongan minoritas sangat penting keberadaannya bagi penghayatan dan pengamalan demokrasi; (3) demokrasi yang berjalan salah arah bukan hanya tidak mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan politik, tetapi bahkan sebaliknya akan menyebabkan kebrokolan politik; (4) meskipun istilah demokrasi digunakan di berbagai negara secara luas untuk menilai baik buruknya suatu sistem pemerintahan atau kepemimpinan, dalam pengamalannya ternyata menimbulkan berbagai masalah; (5) penggunaan istilah demokrasi oleh tokoh-tokoh pemimpin atau negara tertentu di dunia, sebenarnya hanya untuk memperlihatkan keunggulan atau sekedar memberikan justifikasi kepada cara dan gaya kepemimpinannya masing-masing (*Angkatan Bersenjata*, 20-1-1990).

Menteri Dalam Negeri Indonesia, Rudini, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) kebebasan adalah

sumber tumbuhnya kreativitas dan dinamika yang dibutuhkan bagi laju dan berkembangnya pembangunan; (2) tanpa kreativitas pembangunan akan tersendat-sendat dan kehidupan terasa beku, sedangkan kebebasan tanpa tanggung jawab sama artinya dengan kekacauan; (3) tanggung jawab yang disertai moral yang tinggi sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan secara aman dan tertib; (4) Pancasila selain merupakan falsafah hidup dan ideologi bangsa Indonesia, ia juga merupakan wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya; (5) perbedaan pendapat di kalangan tertentu tentang arti, maksud dan pelaksanaan di Indonesia adalah wajar, karena hal itu dijamin oleh demokrasi Pancasila; (6) bagi bangsa Indonesia, demokrasi merupakan suatu proses yang tidak akan datang sendiri, tetapi harus diperjuangkan; (7) pembakuan secara tergesa-gesa dalam dinamika masyarakat yang tumbuh sesuai dengan perputaran zaman hanya akan mengakibatkan terjadinya kebekuan (*Angkatan Bersenjata*, 20-1-1990).

Pernyataan bersama mengatakan: (1) keberadaan pemuda merupakan elemen perubahan dan pembaruan dalam masyarakat; (2) pemuda perlu selalu meningkatkan komitmen dan partisipasinya pada: (a) pembangunan yang berwawasan kebangsaan untuk mewujudkan kesejahteraan; (b) peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan; (c) pendewasaan kehidupan politik; (d) upaya memantapkan proses demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan; (3) hubungan Indonesia-Malaysia mempunyai kesejarahan yang telah membentuk berbagai persamaan antara kedua bangsa di masa lalu; (4) mereka memandang perlu untuk melakukan pengkajian, penelitian dan pengungkapan sejarah untuk memperkokoh asas-asas hubungan kedua negara guna menghadapi berbagai tantangan dan masalah di masa mendatang; (5) hubungan kedua negara merupakan asas yang penting dalam kerangka ASEAN; (6) kesamaan persepsi kedua pihak akan dapat merupakan faktor kestabilan dan pengembangan kerjasama ASEAN; (7) kerjasama ASEAN di berbagai bidang telah mampu membangun dan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi keamanan anggotanya; (8) kerjasama politik belum cukup memadai sebagai dasar untuk memperkokoh keberadaan ASEAN, karena itu perlu didorong dan didukung oleh keberhasilan kerjasama ekonomi dan perdagangan; (9) kerjasama ekonomi dan perdagangan ASEAN diusulkan agar dapat melakukan berbagai terobosan untuk mendobrak berbagai ketimpangan karena kepentingan-kepentingan tertentu; (10) sesama anggota ASEAN hendaknya menyusun program yang meliputi usaha pencapaian sistem perdagangan

terbuka secara sederhana dan melakukan penolakan terhadap kubu-kubu perdagangan di dunia; (11) pertemuan ini mengalami kemajuan yang pesat karena telah menumbuhkan saling pengertian antara kedua pihak, sehingga hubungan dan kerjasama antar pemuda di masa mendatang akan semakin erat dan mesra; (12) mereka sepakat untuk mempertahankan dialog dan bila perlu akan diperluas dialog bilateral di kalangan negara anggota ASEAN; (13) dialog ke-3 akan dilaksanakan di Malaysia pada awal tahun 1992 dengan mengambil jadwal dialog yang akan dilaksanakan setiap dua tahun sekali (*Suara Karya*, 22-1-1990).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

1. Kerjasama Kebudayaan

Pada tanggal 10 Januari 1990 Pusat Kebudayaan ASEAN di Tokyo diresmikan, dan dihadiri oleh para Dubes negara-negara ASEAN dan sejumlah pejabat Jepang, termasuk mantan PM Noburo Takeshita. Pusat kebudayaan yang pendiriannya diprakarsai Japan Foundation, terletak di daerah Shibuya dan menempati lantai ketiga dari suatu gedung perkantoran dengan luas kurang lebih 600m². Ruangan ini akan dilengkapi dengan perpustakaan, koleksi hasil kebudayaan, koleksi data kebudayaan, serta akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertunjukan dan pameran.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Michiko Kunihiro, Menlu Taro Nakayama mengatakan bahwa: (1) Pusat Kebudayaan ASEAN dapat membantu pertukaran kebudayaan antara negara-negara ASEAN dan Jepang; (2) Jepang yang sedang memasuki era *heisei* juga memasuki era pertukaran kebudayaan internasional; (3) rintisan pembentukan Pusat Kebudayaan ASEAN di Jepang, dimulai ketika PM Takeshita berkunjung ke Manila bulan Desember 1987, yang menyatakan perlu adanya pertukaran kebudayaan antara Jepang dan ASEAN (*Antara*, 10-1-1990).

2. Peranan Sektor Swasta Jepang

Dubes RI untuk Jepang, Jogi Supardi, mengatakan pada forum Perhimpunan Pengusaha Jepang (*Keizai*

Doyokai) di Tokyo tanggal 19 Februari 1990 bahwa: (1) kerjasama ASEAN-Jepang di masa yang akan datang tetap merupakan keharusan; (2) Jepang dapat berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi ASEAN dan intensitas kerjasamanya diharapkan meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi ASEAN dan Indonesia; (3) Jepang sebagai sumber modal di masa depan tetap berperan dalam arus dana bagi negara berkembang. Pada tingkat pemerintahan arus dana itu berbentuk bantuan keuangan dan teknik, sedangkan pada tingkat swasta berbentuk investasi; (4) ASEAN perlu mempersiapkan kerjasama di sektor swasta itu, seperti misalnya menyelenggarakan forum studi yang dapat menampung kepentingan kedua belah pihak; (5) peranan swasta Jepang di bidang investasi, yang sejak tahun 1967 merupakan investor terbesar di Indonesia, mulai meningkat dari bidang manufaktur, misalnya perbankan dan usaha kawasan industri; (6) Jepang mendorong para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan investasi di luar negeri dengan memberi sejumlah kemudahan, misalnya pinjaman bersuku bunga rendah dan pengiriman misi-misi perpajakan investasi ke luar negeri (*Antara*, 20-2-1990).

B. HUBUNGAN EKONOMI ASEAN-AS

Sekjen Departemen Industri dan Perdagangan Brunei, Dato Paduka Malai Othman, mengatakan di Singapura tanggal 6 Maret 1990 bahwa: (1) AS dan ASEAN sepakat untuk membuat rekomendasi tentang pembentukan suatu kelompok kerja untuk meningkatkan hubungan ekonominya; (2) kelompok kerja yang beranggotakan para pejabat tinggi bidang ekonomi akan membahas berbagai masalah ekonomi kedua negara; (3) langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kerjasama ekonomi yang merupakan modal dasar bagi pengembangan selanjutnya (*Antara*, 7-3-1990).

C. HUBUNGAN ASEAN-MEE

1. Lokakarya ASEAN-MEE

Lokakarya ASEAN-MEE mengenai Investasi Dalam Industri Berbahan Baku Karet berlangsung di Jakarta tanggal 23 Januari 1990.

Wakil Komisi Masyarakat Eropa, Robert van der Meulen, mengatakan kepada Menteri Perindustrian

Hartarto dan Sekjen ASEAN, Rusli Noor, pada persiapan lokakarya itu tanggal 20 Januari 1990 bahwa: (1) keberadaan Pasar Tunggal Eropa setelah tahun 1992 tidak perlu mengkhawatirkan ekspor ASEAN ke MEE, karena perubahan-perubahan yang terjadi tidak akan mempengaruhi tarif bea masuk maupun pengaturan-pengaturan lainnya dengan negara-negara mitra dagang. Perubahan-perubahan itu hanya berlaku dalam pasar Eropa; (2) eksportir-eksportir ASEAN perlu menyesuaikan strategi dengan keadaan tahun 1992, misalnya mendirikan usaha patungan dengan perusahaan MEE, perjanjian produksi bersama dan lisensi teknologi (*Business News*, 22-1-1990).

Menteri Perindustrian Hartarto mengatakan pada pembukaan lokakarya itu bahwa: (1) kawasan ASEAN akan diperhitungkan dunia sebagai produsen utama pelbagai produk olahan berbahan baku karet; (2) pengembangan industri hilir berbahan baku karet sangat menguntungkan, bukan hanya karena nilai tambahnya yang tinggi, tetapi juga karena permintaan dunia cukup besar.

Sementara itu Ketua BKPM Sanyoto Sastrowardoyo mengatakan bahwa: (1) pengusaha Indonesia agar berkemas menjadi mitra usaha dari sejumlah industriawan produk hilir karet yang sekarang ini siap memindahkan lokasi pabrik mereka ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia. Gelombang relokasi itu terlihat pada industri sepatu olahraga dan sarung tangan karet; (2) datangnya gelombang relokasi baru mampu mendorong nilai dan volume ekspor Indonesia (*Kompas*, 24-1-1990).

2. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-MEE

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-MEE yang dihadiri oleh para Menlu dan Menteri bidang ekonomi ASEAN serta para Menteri dan Deputi Menteri dari 12 negara MEE berlangsung di Kuching, Serawak, tanggal 16-17 Februari 1990. Delegasi Indonesia diwakili oleh Menlu Ali Alatas, Menteri Perdagangan Arifin Siregar dan Menteri Perindustrian Hartarto. Pertemuan ini untuk membahas berbagai masalah politik yang berkaitan dengan perdamaian Kamboja, masalah ekonomi, khususnya mengenai Pasar Tunggal Eropa 1992 dan partisipasi ASEAN dalam Forum Pasifik RIM yang tampaknya akan mempengaruhi hubungan ASEAN-MEE pada dekade mendatang. Pertemuan ini akan didahului dengan pertemuan para pejabat tinggi ASEAN-MEE.

Dirjen Urusan ASEAN Malaysia, Ajit Singh, me-

ngatakan pada jumpa pers di Kuala Lumpur tanggal 9 Februari 1990 bahwa ASEAN; (1) akan meminta jaminan MEE agar hubungan perdagangan kedua belah pihak tidak terganggu oleh terjadinya perubahan drastis di Eropa Timur, karena perubahan dapat mempengaruhi porsi bantuan MEE ke negara-negara ASEAN yang telah berjalan sejak 1972; (2) juga akan meminta jaminan MEE agar pengembangan kedudukan pasar bebas tidak akan merugikan posisi komoditi ekspor Asia Tenggara ke Eropa (*Suara Pembaruan*, 9-2-1990); (3) akan meningkatkan akses ke pasaran MEE, dengan meningkatkan promosi perdagangan, investasi, kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama di sektor-sektor sains dan teknologi (*Kompas*, 13-2-1990).

Sementara itu Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia, Ahmad Kamil Jaafar, mengatakan di Kuching tanggal 12 Februari 1990 bahwa ASEAN tidak menolak MEE untuk memberikan bantuan pinjaman kepada negara-negara Eropa Timur. ASEAN hanya menginginkan kepastian agar tidak dikorbankan (*Kompas*, 13-2-1990).

Dirjen Urusan ASEAN Malaysia, Ajit Singh, juga mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 14 Februari 1990 bahwa ASEAN akan mencari jaminan MEE, agar Pasar Tunggal Eropa mendorong perdagangan yang bebas dan tidak akan menghambat ekspor barang-barang hasil pabrik dan pertanian dengan tarif yang tinggi atau perintang lainnya (*Merdeka*, 15-2-1990).

Menteri Muda Luar Negeri Inggris, Francis Maude, mengatakan kepada wartawan Reuter di Kuching, tanggal 15 Februari 1990, bahwa: (1) Inggris tidak dapat melanjutkan bantuan dan kebijaksanaannya, jika Hanoi menolak untuk menerima kembali orang-orang perahu yang dianggap sebagai pengungsi ekonomi bukan pengungsi politik; (2) dalam dasawarsa terakhir ini, Hongkong telah memberikan suaka pertama untuk 170.000 orang perahu yang melarikan diri dari Vietnam (*Antara*, 16-2-1990).

PM Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN minta jaminan pada MEE agar perdagangan ASEAN-MEE tidak merosot, dan MEE jangan mengalihkan bantuannya ke Eropa Timur; (2) ASEAN khawatir, terbentuknya Pasar Tunggal Eropa akan mengakibatkan negara-negara anggota MEE lebih mengkonsentrasikan ke dalam wilayahnya saja dan para penanam modal

MEE enggan melihat ke luar; (3) cepatnya perkembangan Pasar Tunggal Eropa yang dikombinasikan dengan langkah untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur, ASEAN mengkhawatirkan perdagangan dan investasi MEE berkurang; (4) MEE saat ini merupakan mitra dagang ASEAN ketiga terbesar setelah AS dan Jepang, dengan menyerap 13% ekspor ASEAN; (5) Malaysia mendukung pertemuan tidak resmi mengenai Kamboja yang akan diadakan di Jakarta tanggal 26-28 Februari 1990; (6) selama 14 tahun terakhir ini, pengungsi Vietnam menjadi masalah Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya; (7) ASEAN mengharapkan MEE agar tetap menjadikan hubungan dekat ASEAN sebagai prioritas utama; (8) Pasar Tunggal Eropa semestinya membantu kerjasama dan perdagangan internasional yang menguntungkan semua negara (*Antara*, 16-2-1990).

Menlu Ali Alatas selaku Ketua Komisi Tetap ASEAN mengatakan pada pembukaan pertemuan itu juga bahwa: (1) dari satu segi perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa Timur itu merupakan hal yang positif, tetapi bila dilihat dari segi prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang termasuk ASEAN perubahan itu merupakan hal yang negatif; (2) perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa Timur untuk sementara dapat memperluas pasaran ekspor negara-negara berkembang; (3) kemajuan hubungan Timur-Barat memungkinkan munculnya polarisasi Utara-Selatan sebagai suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan; (4) selama dasawarsa ini, perdagangan ASEAN-MEE secara keseluruhan meningkat dan memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN; (5) ASEAN membutuhkan peningkatan arus pemasaran produk-produknya, terutama produk-produk pertanian dan pabrik-pabrik ke pasar masyarakat Eropa; (6) hasil yang dicapai dalam kemudahan pemasaran barang-barang ASEAN ke pasaran MEE masih jauh dari harapan; (7) perbaikan skema EC-GSP akan menjadi alat yang tepat untuk meningkatkan hubungan dagang ASEAN-MEE, antara lain dalam perluasan mata dagangan, penurunan tarif, kuota yang lebih bebas dan pembaruan pengaturan-pengaturan; (8) ASEAN dan MEE khawatir, Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) hanya akan menjadi proteksionistis; (9) ASEAN keberatan atas terbentuknya Pasar Tunggal Eropa, meskipun ada jaminan dari MEE untuk tidak menjadi benteng terhadap barang-barang produk negara-negara ASEAN (*Antara*, 16-2-1990).

Diberitakan bahwa dalam pertemuan itu: (1) ASEAN dan MEE menginginkan agar AS bersedia mempercepat repatriasi orang-orang perahu atau pengungsi ekonomi Vietnam. Sedangkan AS, dalam pertemuan internasional mengenai pengungsi di Jenewa tahun 1989 telah menetapkan penundaan satu tahun repatriasi terhadap mereka yang disebut bukan pengungsi dari Vietnam dan menyetujui untuk dikembalikan ke negaranya; (2) ASEAN dan MEE mengusulkan agar pemulangan pengungsi Vietnam berlangsung sekitar pertengahan tahun 1990; (3) AS menentang repatriasi secara paksa atas puluhan ribu orang perahu yang telah melarikan diri dari Vietnam, yang sekarang ditampung di kamp-kamp negara pemberi suaka pertama, terutama di Hongkong dan Malaysia (*Antara*, 16-2-1990).

Selain itu Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) para Menlu negara-negara ASEAN sepakat agar negara-negara Asia-Pasifik tidak tergesa-gesa membentuk suatu kelompok ekonomi regional; (2) pembicaraan mengenai usul Australia bagi pembentukan Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) agar dilanjutkan; (3) ASEAN tidak menghendaki APEC segera dilembagakan; (4) Forum Kerjasama Asia-Pasifik sebaiknya didasarkan pada mekanisme ASEAN yang ada, yang merupakan modifikasi bersama dari pertemuan post-ministerial dan mekanisme Menteri Ekonomi ASEAN (*Kompas*, 17-2-1990); (5) MEE tidak keberatan dengan terbentuknya suatu kelompok ekonomi Asia-Pasifik, tetapi menolak bila kelompok itu menjadi suatu blok perdagangan (*Suara Karya*, 17-2-1990).

Menlu Italia, Gianni De Michelis, mengatakan di Jakarta tanggal 17 Februari 1990 bahwa: (1) ASEAN dan MEE sepakat untuk memberikan prioritas pada keprihatinan masalah lingkungan hidup; (2) isu hutan tropis tidak hanya dikembangkan oleh kelompok politik demi vested interests (*Suara Pembaruan*, 18-2-1990).

Antara tanggal 19 Februari 1990 memberitakan sebagai berikut: (1) MEE akan menghentikan dukungan kepada koalisi gerilyawan Kamboja dalam pemungutan suara untuk menduduki kursi Kamboja di PBB. Langkah ini merupakan perubahan sikap negara-negara MEE mengenai konflik Kamboja dan merupakan suatu tanda berkurangnya dukungan diplomatik internasional pada aliansi yang didominasi oleh kelompok Khmer Merah; (2) ASEAN dan MEE menyetujui suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa Khmer Merah, yang merupakan tulang punggung kekuatan militer kelompok perlawanan Kamboja, harus dicegah untuk berkuasa kembali dan pencegahannya harus dilakukan secara militer.

Hasil pertemuan antara lain: (1) ASEAN mempengaruhi permintaannya agar MEE memberi akses pasar yang lebih baik bagi produk-produk tropis dan pertanian. Tetapi MEE menyatakan bahwa akses pasar seperti itu harus diatur melalui pembicaraan babak Uruguay dari mekanisme GATT; (2) para diplomat ASEAN tetap memprihatinkan posisi timbal-balik MEE dan berbagai kebijaksanaan yang lain, seperti penerapan standar-standar impor bersama untuk menghadapi Pasar Tunggal Eropa 1992 dan peluang-peluang perdagangan yang seimbang. Para diplomat ASEAN mengatakan, prinsip timbal-balik hanya berlaku bagi produk-produk tropis dan pertanian ASEAN, misalnya kayu dan kakao yang sampai sekarang tidak tercakup dalam perundingan-perundingan perdagangan multilateral; (3) posisi MEE dalam hal timbal-balik tidak meluas keluar area bidang jasa, seperti perbankan; (4) MEE memperhatikan permintaan ASEAN untuk mengadakan suatu pertemuan khusus mengenai ekonomi dan perdagangan di masa mendatang (*Angkatan Bersenjata*, 19-2-1990).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

A. PERTEMUAN INFORMAL TENTANG KAMBOJA (PIK)

1. Persiapan-persiapan

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 3 Januari 1990 bahwa: (1) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Kamboja agar mengadakan perundingan untuk mencari penyelesaian secara menyeluruh; (2) Indonesia bersedia menjadi tuan rumah pertemuan informal (*Kompas*, 4-1-1990); (3) Indonesia akan terus melaksanakan peranannya sebagai penengah secara konsisten (*Merdeka*, 4-1-1990).

Sehubungan dengan pertemuan informal tentang Kamboja itu, Menlu Ali Alatas mengatakan di Jakarta tanggal 15 Januari 1990 bahwa: (1) pertemuan informal di Jakarta akan dilangsungkan pada minggu ketiga bulan Februari 1990; (2) semua pihak yang terlibat langsung dalam konflik Kamboja tidak keberatan menerima gagasan Menlu Gareth Evans untuk melibatkan PBB sebagai pemerintahan sementara di Kamboja (*Kompas*, 16-1-1990); (3) tanpa dukungan DK-PBB, konflik Kamboja tidak dapat diselesaikan (*Suara Karya*, 16-1-1990).

Di samping itu sesuai diterima Presiden Soeharto di Cendana tanggal 16 Januari 1990, Menlu Ali Alatas me-

ngatakan bahwa: (1) Australia diundang untuk menghadiri pertemuan informal tentang Kamboja guna menjelaskan gagasannya tentang masalah Kamboja; (2) Presiden Soeharto setuju pertemuan informal dilangsungkan di Jakarta (*Kompas*, 17-1-1990).

Sementara itu pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR-RI di Jakarta tanggal 5 Februari 1990 Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) pertemuan informal yang akan berlangsung pada bulan Februari 1990 itu, bukan merupakan kelanjutan dari JIM atau JIM Plus. Pertemuan itu adalah Pertemuan Informal tentang Kamboja (PIK); (2) PIK merupakan pertemuan pendahuluan sebagai kelanjutan Pertemuan Paris (*Antara*, 5-2-1990).

Juru bicara pemerintah Thailand, Suvit Yodmani, mengatakan di Bangkok tanggal 9 Februari 1990 bahwa: (1) Khmer Merah menolak menghadiri pertemuan informal di Jakarta, yang akan berlangsung pada tanggal 26-28 Februari 1990; (2) Pangeran Sihanouk gagal membujuk Khmer Merah; (3) Pangeran Sihanouk tidak menghendaki penyelesaian masalah Kamboja di medan tempur. Ia menyerukan agar semua faksi di Kamboja meletakkan senjata (*Antara*, 10-2-1990); (4) meskipun Khmer Merah tidak akan hadir dalam pertemuan informal di Jakarta, tetapi akan hadir dalam pertemuan di Paris yang akan datang (*Kompas*, 11-2-1990).

Menlu Austria, Alois Mock, mengatakan di Bangkok tanggal 11 Februari 1990 bahwa: (1) keputusan Khmer Merah untuk tidak menghadiri pertemuan informal di Jakarta menghambat usaha-usaha perdamaian di Kamboja; (2) peranan PBB dalam penyelesaian masalah Kamboja merupakan titik awal yang baik (*Antara*, 12-2-1990); (3) penolakan Khmer Merah merupakan usaha untuk meningkatkan sikap tawar-menawar dengan cara militer (*Antara*, 14-2-1990).

Dalam pernyataannya yang disiarkan di Bangkok tanggal 11 Februari 1990, Khieu Samphan mengatakan bahwa: (1) perundingan damai mengenai Kamboja yang hanya difokuskan pada usul Australia tentang pemerintahan sementara di bawah PBB tidak akan menyelesaikan masalah. Pertemuan akan berhasil apabila kelima anggota tetap DK-PBB hadir dan masalah Kamboja diselesaikan secara menyeluruh; (2) Vietnam agar diikutsertakan dalam perundingan dan bukan sebagai partisan yang duduk di luar masalah Kamboja; (3) dia menolak pertemuan yang hanya melibatkan empat faksi Kamboja (*Kompas*, 13-2-1990).

Roland Eng, juru bicara pers pada Kantor Pangeran Sihanouk, mengatakan di Bangkok tanggal 13 Februari 1990 bahwa: (1) pemimpin Khmer Merah, Khieu Samphan, akan hadir dalam pertemuan informal di Jakarta; (2) kehadirannya akan memberi momentum baru dalam penyelesaian masalah Kamboja (*Antara*, 14-2-1990).

Dubes Vietnam untuk Thailand, Nguyen Trung, mengatakan di Jakarta tanggal 15 Februari 1990 bahwa: (1) dalam pertemuan informal di Jakarta, Vietnam akan mengusulkan penyelenggaraan pemilu sebagai cara terbaik untuk mengakhiri konflik Kamboja; (2) jika empat faksi menyetujui Dewan Tertinggi (*Supreme Council*) yang diusulkan Australia sebagai tempat menampung kekuasaan, maka tidak akan terjadi perpecahan dalam faksi; (3) Pertemuan Paris 1989 gagal karena tidak sesuai dengan pendirian keempat faksi, mereka memusatkan diri pada masalah yang tidak dapat dipecahkan yaitu pembagian kekuasaan (*Kompas*, 17-2-1990).

Kehadiran Khmer Merah juga dibenarkan oleh Menlu Ali Alatas, ketika dia memberi keterangan pers di Jakarta tanggal 17 Februari 1990. Khmer Merah secara resmi menyatakan ikut dalam PIK, dan selain empat faksi Kamboja, maka ASEAN, Laos, Vietnam, Perancis, Australia dan PBB akan hadir dalam PIK juga (*Kompas*, 19-2-1990).

Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan kepada wartawan Kompas, Ratih Hardjono, di Canberra tanggal 22 Februari 1990 bahwa: (1) prakarsa Australia untuk membentuk pemerintahan sementara guna menyelesaikan konflik Kamboja, sepenuhnya masih dalam kerangka strategi ASEAN, dan bukan merupakan ide baru; (2) Australia telah menyerahkan dokumen (*resource document*) setebal 150 halaman kepada keempat faksi Kamboja. Dokumen itu tanpa judul dan berisi rincian lengkap tentang pembiayaan, konsekuensi, pilihan-pilihan kalau pemerintahan sementara terbentuk dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan sementara (*Kompas*, 24-2-1990).

Setibanya di Jakarta, tanggal 23 Februari 1990, Menlu Gareth Evans mengatakan bahwa: (1) peranan utama yang akan dilaksanakan PBB sebagaimana diusulkan Australia, tidak hanya dalam proses pemilu ataupun proses mencari perdamaian, tetapi menjalankan peran yang sebenarnya dalam administrasi sipil negara Kamboja sebagai ganti dari pemerintahan *quadrupartite* (*Antara*, 24-2-1990); (2) Australia akan memberikan bantuan US\$1 juta untuk pembentukan peme-

rintahan sementara di Kamboja (*Kompas*, 24-2-1990).

Wakil Presiden National Government of Cambodia (NGC) Urusan Luar Negeri, Khieu Samphan, mengatakan di Jakarta tanggal 25 Februari 1990 bahwa hasil PIK tergantung pada sikap Vietnam yang mendukung rezim Phnom Penh pimpinan Hun Sen, penarikan pasukan Vietnam secara total dan pemberian kepercayaan kepada PBB untuk menyelesaikan konflik Kamboja secara damai (*Antara*, 26-2-1990).

Pemimpin kelompok Funcinpec, Pangeran Ranariddh, mengatakan di Jakarta tanggal 26 Februari 1990 bahwa: (1) kelompoknya mengajukan tiga usul utama untuk menyelesaikan masalah Kamboja, yaitu pembubarisan kedua pemerintahan Kamboja, pengakuan peranan penting PBB dan pendirian Dewan Nasional Tertinggi (SNC); (2) untuk menciptakan kerukunan nasional di Kamboja, komposisi SNC harus terdiri dari empat faksi; (3) Funcinpec menginginkan PBB tidak saja berperan dalam pengawasan pemilu, tetapi juga dalam penarikan mundur pasukan Vietnam dan pemerintahan sementara di Kamboja (*Antara*, 26-2-1990).

Menjelang dilangsungkannya PIK timbul kekhawatiran bahwa pembahasan tentang pembentukan pemerintahan sementara di bawah PBB justru akan memperumit masalah Kamboja. Hal ini tampak seperti yang dikhawatirkan oleh PM NGC, Son Sann, dan Wakil Presiden NGC Urusan Luar Negeri, Khieu Samphan. Kedua pemimpin itu menuntut agar pemerintahan Phnom Penh (*State of Cambodia* - SOC) yang dipimpin oleh PM Hun Sen dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk pemerintahan sementara quadripartite. Dalam pemerintahan sementara itu, setiap pihak mempunyai persamaan derajat.

SOC yang diwakili PM Hun Sen tidak setuju dengan usul tersebut dan mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara dua pihak antara NGC yang dipimpin Sihanouk dan SOC yang dipimpinnya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa: (1) Khmer Merah dapat dimasukkan ke dalam NGC sebagai bagian dari NGC, dan bukan merupakan kelompok yang berdiri sendiri; (2) pemerintahan sementara bertugas mempersiapkan pemilu dan akan berjalan bersama SOC; (3) dia keberatan apabila pemerintahannya harus dibubarkan; (4) kesulitan lain yang akan timbul apabila PBB berperan sebagai pemerintahan sementara adalah tentang penggunaan bahasa Khmer serta mengatasi keperluan hidup sehari-hari seperti listrik, air, gas dan sebagainya (*Kompas*, 26-2-1990).

2. Sidang-sidang PIK

Pertemuan informal tentang Kamboja (PIK) yang dihadiri oleh pemimpin empat faksi Kamboja, Menlu Perancis, Roland Dumas, Menlu Australia, Gareth Evans, utusan khusus Sekretariat Jenderal PBB, Rafeudin Ahmed, utusan Vietnam dan Laos serta para Menlu negara ASEAN berlangsung di Jakarta, tanggal 26-28 Februari 1990.

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) peran aktif para peserta membuktikan adanya tekad bersama untuk menyelesaikan masalah Kamboja secara menyeluruh serta merupakan era baru untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan kemajuan bersama di Asia Tenggara; (2) dua sasaran utama penyelesaian Kamboja yang merupakan sasaran antara adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil di bawah pengawasan internasional serta pembentukan negara Kamboja yang merdeka, berdaulat, damai, netral dan nonblok; (3) PIK pada dasarnya merupakan pertemuan informal pendahuluan bagi Konperensi Paris yang bersifat formal; (4) PIK berusaha merinci beberapa aspek dari peranan PBB dengan menggunakan ide pokok usul Australia sebagai dasar pembicaraan serta menjembatani perbedaan pendapat; (5) PIK tidak akan menyimpang dari pendekatan menyeluruh yang telah disetujui dalam Konperensi Paris; (6) semua faksi setuju usul Australia tentang keterlibatan PBB; (7) keputusan Sekjen PBB untuk membentuk Satgas Intra-Sekretariat tentang Kamboja di bawah kepemimpinan Sekjen PBB merupakan perkembangan positif yang akan memperlancar rencana keterlibatan PBB tersebut.

Sementara itu Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa: (1) perlu diciptakan iklim kepercayaan agar bangsa Kamboja bebas menentukan nasibnya sendiri serta bebas dari rasa takut, intimidasi dan tindak kekerasan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar; (2) perlu diciptakan iklim yang memberikan persamaan kesempatan kepada semua partai politik sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan; (3) tiga hal penting yang diperlukan untuk mencapai iklim kepercayaan adalah proses pemilu yang berlangsung bebas dan adil, upaya dan mekanisme yang memungkinkan rakyat Kamboja memberikan hak pilihnya tanpa rasa takut serta hal-hal yang berkenaan dengan pembentukan pemerintahan sipil di Kamboja; (4) PBB tidak hanya diperlukan untuk memantau pemilu, tetapi juga mengatur dan melaksanakan pemilu itu; (5) akan dibentuk Dewan Agung Nasional sebagai cerminan dari kedaulatan dan persatuan nasional Kamboja selama

masa peralihan. Dewan itu merupakan tempat untuk berkonsultasi bagi mereka yang melaksanakan fungsi pemerintahan, pengorganisasi pemilu, pengawasan keamanan dan pemantauan serta verifikasi.

Utusan khusus Sekjen PBB, Rafeudin Ahmed, mengatakan bahwa: (1) PBB mengharapkan usul-usul yang dihasilkan bersifat realistis; (2) pelaksanaan ikut sertanya PBB masih memerlukan persetujuan DK-PBB serta pihak yang terlibat dalam masalah Kamboja (*Antara*, 27-2-1990).

Pada pertemuan hari kedua tanggal 27 Februari 1990, pemimpin Khmer Merah, Khieu Samphan, mengatakan bahwa: (1) pembentukan pemerintahan sementara empat pihak (quadripartite) dapat mengakhiri pembagian kawasan-kawasan yang selama ini dikuasai oleh masing-masing kelompok; (2) pembagian kawasan itu hanya akan menghalangi tugas pengawasan PBB di Kamboja; (3) terbentuknya pemerintahan empat pihak akan merupakan penerimaan prinsip perujukan nasional; (4) delapan butir yang dapat dilakukan PBB untuk menjamin proses pemulihan perdamaian di Kamboja adalah pengawasan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, pengawasan perlucutan senjata keempat faksi di Kamboja, pengawasan gencatan senjata, pengawasan pemilu yang bebas dan demokratis, jaminan PBB untuk membentuk pemerintahan quadripartite di bawah pimpinan Norodom Sihanouk, operasi bersama di bawah pemerintahan sementara quadripartite, penempatan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dalam waktu yang tidak ditentukan dengan personil yang memadai untuk menjamin perdamaian, keamanan dan stabilitas di Kamboja, serta jaminan PBB bagi kemerdekaan, netralitas dan integritas Kamboja dalam suatu pemerintahan dengan ekonomi liberal dan demokrasi banyak partai (*Antara*, 27-2-1990).

Ketua delegasi Funcinpec, Pangeran Ranaridh, mengatakan bahwa: (1) PIK agar membantu mendesak PBB untuk mengawasi dan mengontrol penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja; (2) usul Australia tentang pemerintahan sementara PBB agar dilaksanakan secara efektif; (3) masalah penarikan mundur semua pasukan asing dari Kamboja, gencatan senjata, perlucutan senjata secara total, pengontrolan suplai senjata serta pemeliharaan keamanan dan perdamaian di bawah pengawasan PBB agar dilaksanakan secara efektif; (4) pemerintahan sementara dibentuk untuk mengorganisasikan pemilu yang bebas, adil dan demokratis (*Antara*, 27-2-1990).

PM Hun Sen mengatakan bahwa: (1) pemerintahnya menerima peran serta PBB dan penghentian bantuan militer asing bagi kedua pemerintahan Kamboja demi terlaksananya pemilu yang bebas dan adil, asal tidak terjadi kekosongan yang memungkinkan kelompok Pol Pot berkuasa kembali; (2) penyelesaian politik Kamboja tidak cukup hanya dengan membentuk pemerintahan sementara setelah membubarkan kedua pemerintahan Kamboja yang ada sekarang (*Antara*, 27-2-1990); (3) peranan PBB dalam pemerintahan sementara selama masa transisi hendaknya pada tingkat yang perlu saja; (4) pihaknya menolak pembubaran dua pemerintahan di Kamboja; (5) perlu didorong kehadiran PBB di Kamboja pada tingkat yang pantas, dan pembentukan Dewan Nasional Tertinggi yang akan menjadi simbol dari kesatuan dan kedaulatan nasional Kamboja (*Kompas*, 28-2-1990).

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 27 Februari 1990 bahwa: (1) penyelesaian masalah Kamboja merupakan hal yang rumit dan kompleks sehingga belum ada penyelesaian dan PIK belum menghasilkan sesuatu yang konkrit mengenai peranan PBB; (2) PIK hanya salah satu dari berbagai pertemuan yang mengupayakan penyelesaian masalah Kamboja (*Kompas*, 28-2-1990).

Sementara itu Khieu Samphan mengatakan bahwa: (1) semua tindakan yang berkaitan dengan pemilu harus dilaksanakan oleh pemerintahan sementara Kamboja empat pihak serta di bawah pengawasan PBB; (2) delapan macam peran PBB yang berbeda-beda sifat dan intensitasnya itu adalah: (a) mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam; (b) mengawasi gencatan senjata; (c) mengawasi perlucutan senjata pasukan semua faksi Kamboja; (d) melaksanakan pemilu; (e) mengadakan sensus penduduk sebelum pemilu; (f) menjamin terciptanya kondisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan sementara empat pihak serta kemerdekaan, netralitas dan kedaulatan Kamboja yang demokratis multipartai dan berekonomi liberal; (g) menempatkan pasukan perdamaian dengan personil yang cukup untuk jangka lama guna menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas Kamboja; (h) memegang kekuasaan pemerintahan sementara dalam masa peralihan serta segala aspek dan konsekuensinya; (3) perlu dibentuk pemerintahan sementara empat pihak atas dasar persamaan derajat; (4) keterlibatan PBB di Kamboja hanya sebagai pelengkap dan penjamin keberadaan pemerintahan sementara quadripartite (*Kompas*, 28-2-1990).

Pemimpin KPNLF Son Sann mengatakan bahwa:

(1) PIK seharusnya membahas masalah utama yang belum diselesaikan yaitu verifikasi penarikan tentara Vietnam dari Kamboja; (2) SOC dan NGC agar dibubarkan dan sebagai gantinya perlu segera dibentuk pemerintahan sementara empat partai yang diperkuat tentara pemelihara perdamaian PBB sehingga dapat terselenggara pemilu; (3) zona Angkor-Siemreap yang merupakan warisan kebudayaan Kamboja agar dijadikan zona bebas dari pertempuran (*Suara Karya*, 28-2-1990).

PIK berakhir tanpa kesepakatan bersama. Khmer Merah disebut-sebut sebagai penyebab kegagalan PIK. Sejumlah peserta PIK menyatakan antara lain bahwa: (1) Khmer Merah tidak memberikan konsensi dalam beberapa aspek penting mengenai penyelesaian konflik Kamboja; (2) Khmer Merah telah memanfaatkan sistem suara bulat (*unanimity rule*), untuk memveto rancangan dokumen yang berisi kesepakatan-kesepakatan PIK; (3) rancangan dokumen yang terdiri dari 17 pasal yang berjudul "Record of Understanding" yang berisi tahap-tahap penyelesaian konflik Kamboja gagal dijadikan dokumen resmi PIK karena Khieu Samphan menolak perumusan kalimat tentang pencegahan kembalinya rezim pembunuhan massal (*genocide*). Sebaliknya pihak Phnom Penh dan Vietnam tetap menuntut agar kalimat *genocide* dicantumkan dalam rancangan dokumen tersebut.

PM Hun Sen mengatakan pada jumpa pers bahwa: (1) sumber kemacetan PIK bukan proposal Gareth Evans, melainkan keberatan Khmer Merah atas penggunaan kata *genocide*; (2) penyelesaian konflik Kamboja hanya dapat dilakukan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat Kamboja menentukan nasibnya sendiri; (3) isu *genocide* adalah isu internasional, oleh sebab itu PBB perlu mempertimbangkan hukuman kriminal yang dilakukan oleh Khmer Merah; (4) Vietnam telah menarik pasukannya dari Kamboja sejak tanggal 26 September 1989; (5) tuduhan bahwa Vietnam mendatangkan kembali pasukannya untuk membantu Pemerintahan Phnom Penh sengaja diciptakan oleh ketiga faksi NGC sebagai alasan untuk meneruskan peperangan (*Antara*, 1-3-1990).

Sementara itu Menlu Gareth Evans mengatakan bahwa: (1) salah satu terobosan besar yang dicapai PIK adalah kesediaan Khmer Merah untuk menerima peran PBB dalam pembentukan pemerintahan sipil sementara di Kamboja, meskipun rincian keterlibatan PBB itu masih harus didiskusikan lebih lanjut; (2) kesepakatan mengenai perlunya upaya untuk mengembalikan serta merehabilitasi para pengungsi merupakan petunjuk

bahwa peran misi pencari fakta PBB telah diterima, meskipun waktunya belum ditentukan; (3) isu pokok yang belum disepakati adalah masalah perlu tidaknya mencantumkan istilah pencegahan kembali praktek pembunuhan massal (*Antara*, 1-3-1990).

Pemimpin Khmer Merah Khieu Samphan mengatakan pada jumpa pers tanggal 1 Maret 1990 bahwa: (1) Khmer Merah akan terus berperang melawan Vietnam karena PIK gagal; (2) masalah invasi Vietnam harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pihak-pihak yang bertikai melangkah ke masalah lainnya; (3) dia tetap menuntut pembentukan pemerintahan sementara quadripartite; (4) pemerintahan quadripartite diperlukan sebagai mitra misi pencari fakta PBB, yang pembentukannya akan ditentukan pada pertemuan lima anggota tetap DK-PBB di Paris yang akan datang (*Antara*, 1-3-1990).

Menlu Ali Alatas yang didampingi Pembantu Menlu Perancis, Claude Martin, mengatakan pada briefing khusus untuk para Menlu ASEAN bahwa: (1) perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok Kamboja masih terlalu lebar untuk dijembatani; (2) upaya Indonesia mempersiapkan non-paper yang merupakan gabungan dari intisari gagasan Australia, hasil Konferensi Paris dan rekomendasi utusan khusus Sekjen PBB Rafeudin Ahmad yang pada dasarnya merupakan suatu mandat bagi peranan PBB di Kamboja tidak dapat diterima; (3) upaya membuat pernyataan bersama singkat yang didasarkan pada Pernyataan Bersama Sihanouk-Hun Sen tanggal 21 Februari 1990 di Bangkok, yang menyerukan suatu kehadiran PBB pada tingkat yang pantas, dan pembentukan suatu Dewan Nasional Tertinggi sebagai simbol kedaulatan dan persatuan nasional Kamboja gagal dilaksanakan (*Kompas*, 1-3-1990).

Dalam jumpa pers sesuai penutupan PIK, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) kegagalan PIK merupakan hasil maksimum yang dapat dicapai, mengingat dua kubu kelompok Kamboja yang bersengketa ternyata baru pada taraf berunding, belum siap untuk berdamai; (2) kegagalan PIK mengakibatkan hilangnya momentum perkembangan positif; (3) sudah saatnya kedua kubu kelompok Kamboja itu dibiarkan saling berhadapan sendiri di meja perundingan, tanpa pihak ketiga; (4) tanggung jawab orang-orang Kamboja sendiri lah untuk memperlihatkan kemauan baik dan kesungguhan guna menghentikan pembunuhan dan tragedi di negaranya (*Kompas*, 2-3-1990).